



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT
MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020
18 – 20 DESEMBER 2019**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) berjumlah 14 (empat belas) orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, **Saan Mustopa (F-Nasdem)**.

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jabar selengkapnya adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Saan Mustopa | : | Ketua Tim/ F-Nasdem |
| 2. Komarudin Watubun | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 3. Ir. Endro Suswanto Yahman, M.Sc | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 4. Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 5. Ir. Hugua | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 6. Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA | : | Anggota/F-PG |
| 7. Dr. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc | : | Anggota/F-Gerindra |
| 8. Ahmad Muzani | : | Anggota/F-Gerindra |
| 9. Rachel Maryam Sayidina | : | Anggota/F-Gerindra |
| 10. Drs. Tjetjep Muchtar Soleh, MM | : | Anggota/F-Nasdem |
| 11. Yanuar Prihatin, M.Si | : | Anggota/F-PKB |
| 12. Wahyu Sanjaya, SE | : | Anggota/F-PD |
| 13. Mohamad Muraz, SH, MM | : | Anggota/F-PD |
| 14. Teddy Setiadi, S.I.Kom | : | Anggota/F-PKS |

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Kabag dan Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, wartawan DPR RI (bagian Pemberitaan dan TV Parlemen), serta utusan dari beberapa Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PANRB, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, BKN, LAN, ANRI, ORI, dan Bawaslu.

B. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jabar ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur Jabar beserta para pejabat Pemerintah Provinsi Jabar, Pejabat Pemerintah Kabupaten di wilayah Jabar yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jabar beserta jajarannya, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jabar, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jabar.

Beberapa topik yang menjadi fokus perhatian Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja reses kali ini adalah berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi Jabar, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik, masalah-masalah pertanahan, serta pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Jabar.

Seluruh data, informasi, maupun masukan yang diperoleh dari kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II DPR RI untuk nantinya ditindaklanjuti pada rapat-rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. PERTEMUAN DENGAN KPU PROVINSI JABAR

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

NPHD untuk 8 kabupaten/kota di provinsi Jabar yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 telah selesai ditandatangani keseluruhan per-tanggal 1 Oktober 2019, dengan jumlah usulan dan alokasi anggaran sebagai berikut :

No.	KPU Kab/Kota	Usulan Anggaran (Rp)	NPHD (Rp)
1.	Kab.Sukabumi	78.000.000.000	73.995.270.100
2.	Kab. Cianjur	83.000.000.000	74.000.000.000
3.	Kab. Karawang	79.351.744.621	74.620.440.500
4.	Kab. Bandung	99.032.378.543	99.032.378.543
5.	Kab. Tasikmalaya	85.033.141.985	57.500.000.000
6.	Kab. Indramayu	80.661.420.581	65.800.000.000
7.	Kota Depok	74.873.578.450	60.298.660.000
8.	Kab. Pangandaran	35.210.380.769	28.339.500.000

2. Persiapan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

- Dalam rangka persiapan pembentukan badan penyelenggara adhoc (PPK dan PPS), KPU Provinsi Jabar telah melakukan koordinasi dengan 8 KPU kab/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, termasuk terkait penyusunan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Adhoc (PPK, PPS, dan KPPS), serta pembahasan isu-isu strategis.
- Untuk mengisi komposisi anggota badan penyelenggara adhoc tersebut, selain dari tokoh masyarakat, akan ada pula dari unsur pelajar/mahasiswa. Adapun

penghitungan persyaratan adalah tidak pernah menjabat pada posisi yang sama selama 2 periode, jangka waktu 1 periode selama 5 tahun, dihitung sejak Pemilu tahun 2004, yaitu periode 2004-2008, periode 2009-2013, dan periode 2014-2018.

3. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- Daftar pemilih yang sudah dipersiapkan saat ini baru digunakan untuk perhitungan batas minimum dukungan perseorangan peserta pilkada tahun 2020, karena DP4 baru akan diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU pada tanggal 20 s/d 23 Februari 2020 (sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2019). Diharapkan DP4 yang akan disampaikan tersebut sudah memasukkan pula pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el.
- Jumlah pemilih potensial pada pilkada serentak tahun 2020 di 8 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada tersebut secara keseluruhan diperkirakan sebanyak 6.041.041 pemilih, yang terdiri dari :

No.	KPU Kab/Kota	Jmlh Pemilih (Laki-Laki)	Jmlh Pemilih (Perempuan)	Jmlh Pemilih (Total)
1.	Kab.Sukabumi	934.793	908.731	1.843.524
2.	Kab. Cianjur	843.338	816.369	1.659.707
3.	Kab. Karawang	873.641	831.580	1.705.221
4.	Kab. Bandung	1.194.893	1.165.766	2.360.659
5.	Kab. Tasikmalaya	689.968	676.497	1.366.465
6.	Kab. Indramayu	695.554	694.328	1.389.882
7.	Kota Depok	650.283	659.055	1.309.338
8.	Kab. Pangandaran	158.571	161.547	320.118

4. Permasalahan dan Masukan dari KPU Provinsi Jabar

- Terdapat kenaikan jumlah honorarium badan adhoc berdasarkan Surat Kemenkeu No.S-735/Mk.08/2018. Namun demikian penyesuaian belum dapat dilaksanakan karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan. Total selisih jumlah honorarium awal honorarium dengan setelah terbitnya surat Kemenkeu tersebut adalah sebagai berikut :

No.	KPU Kab/Kota	RKB sesuai usulan (Rp)	RKB setelah penyesuaian (Rp)	Selisih kekurangan (Rp)
1.	Kab.Sukabumi	38.047.450.000	60.207.250.000	22.159.800.000
2.	Kab. Cianjur	10.534.600.000	15.982.600.000	5.448.000.000
3.	Kab. Karawang	33.329.800.000	49.218.700.000	15.888.900.000
4.	Kab. Bandung	44.826.250.000	65.812.650.000	20.986.400.000
5.	Kab. Tasikmalaya	30.072.870.000	48.533.650.000	18.460.780.000
6.	Kab. Indramayu	33.152.600.000	39.511.450.000	6.358.850.000
7.	Kota Depok	8.870.800.000	11.971.300.000	3.100.500.000
8.	Kab. Pangandaran	8.928.850.000	12.063.000.000	3.134.150.000

- Masih ada aturan yang memerlukan penegasan dan disinkronkan dengan peraturan Bawaslu. Salah satunya adalah aturan penyerahan berkas calon perseorangan, dimana dalam PKPU hanya terdapat 2 rangkap (untuk KPU dan arsip), sementara Bawaslu juga tetap meminta berkas tersebut. Hal ini akan

berpotensi konflik karena masing-masing pihak akan bertahan dengan aturan yang dipedomani.

- Proses pemutakhiran daftar pemilih sangat panjang sehingga dapat berdampak ke penyediaan logistik, karena waktu yang tersedia menjadi pendek untuk proses pengadaan dan distribusinya.
- Perubahan jumlah pemilih di setiap TPS dari 300 per-TPS menjadi 800 per-TPS cukup merepotkan, namun demikian akan diantisipasi dengan meminta setiap KPU kab/kota untuk segera melakukan pemetaan terlebih dahulu.
- Dengan adanya rencana penggunaan e-Rekap, maka badan adhoc dan sekretariat memerlukan SDM yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi dan informasi.
- Anggaran KPU Jabar yang berasal dari APBN sebagian besar teralokasi untuk biaya operasional, dan hanya tersisa sekitar Rp500 juta untuk kegiatan. Untuk itu, beberapa kegiatan Kemendagri yang menjadi bagian dari kegiatan Tugas Perbantuan ada juga yang bisa diarahkan untuk membantu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

5. Catatan dari Anggota Komisi II DPR RI

- Walaupun jumlah kebutuhan anggaran sebagaimana yang diusulkan tidak sepenuhnya dipenuhi, KPU tetap harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas disetiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, karena integritas penyelenggara menjadi salah satu faktor utama untuk dapat mewujudkan pemilu yang berkualitas, yang akan mampu pula melahirkan kepala daerah yang benar-benar memiliki, kapabilitas, integritas, dan kredibilitas.
- Peran KPU sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih, sehingga masyarakat dapat memahami betapa pentingnya untuk menggunakan hak konstitusi mereka dalam memilih kepala daerah.
- Sosialisasi akan latar belakang setiap calon harus dimaksimalkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas kualitas dan kapabilitas dari masing-masing calon.
- KPU harus segera mengidentifikasi berbagai permasalahan secara spesifik di masing-masing daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Jabar, agar dapat segera pula disiapkan langkah antisipasi.
- Sebaiknya KPU mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih terkait jumlah penghasilan resmi kepala daerah, agar masyarakat memiliki gambaran utuh terhadap calon sebelum dan sesudah yang bersangkutan memegang jabatan sebagai kepala daerah.

B. PERTEMUAN DENGAN BAWASLU PROVINSI JABAR

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

NPHD untuk anggaran pengawasan Pilkada yang dialokasikan kepada 8 Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 telah selesai ditandatangani per tanggal 1 Oktober 2019, sebagai berikut :

No.	Bawaslu Kab/Kota	Usulan Anggaran (Rp)	NPHD (Rp)
1.	Kab.Sukabumi	36.285.604.000	31.300.000.000
2.	Kab. Cianjur	30.078.420.000	24.000.000.000
3.	Kab. Karawang	33.900.430.000	23.358.055.000
4.	Kab. Bandung	28.912.520.000	28.911.420.000
5.	Kab. Tasikmalaya	36.285.604.000	23.200.000.000
6.	Kab. Indramayu	33.833.291.933	23.073.626.500
7.	Kota Depok	24.715.765.078	15.350.000.000
8.	Kab. Pangandaran	13.266.176.000	10.052.200.000

2. Persiapan Pembentukan Pengawas Pemilu Adhoc

Pembentukan pengawas pemilu adhoc telah mulai dilaksanakan untuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dimana dari sebanyak 2.739 pendaftar yang tersebar di 8 kab/kota, yang dinyatakan lulus tahap awal (lulus administrasi) adalah sebanyak 2.622 orang, dan dapat melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya, yakni wawancara.

No.	Bawaslu Kab/Kota	Jumlah Pendaftar	Lulus Administrasi	Jadwal Wawancara
1.	Kab.Sukabumi	593	590	13-17 Des 2019
2.	Kab. Cianjur	393	386	13-21 Des 2019
3.	Kab. Karawang	255	249	14-17 Des 2019
4.	Kab. Bandung	312	301	14-17 Des 2019
5.	Kab. Tasikmalaya	391	378	13-18 Des 2019
6.	Kab. Indramayu	559	501	13-19 Des 2019
7.	Kota Depok	110	99	13-17 Des 2019
8.	Kab. Pangandaran	126	118	13-17 Des 2019

3. Potensi Kerawanan pada Setiap Tahapan Pilkada

Potensi kerawanan dalam catatan Bawaslu Provinsi Jabar terdapat pada setiap tahapan, yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. DPT

- Validitas dan keakuratan data DP4
- Validitas dan keakuratan pendataan pemilih di daerah berkarakter khusus (Daerah tambang, perkebunan, LP, realokasi korban bencana, dll)
- Kemutakhiran data pemilih dalam DPS, DPT, maupun DPTb.

b. Pencalonan

- Ketepatan penetapan jumlah dukungan minimal Paslon Perseorangan
- Validitas dan keabsahan dokumen persyaratan paslon
- Ketaatan prosedur pemeriksaan persyaratan paslon
- Kepengurusan ganda atau kondisi kepengurusan masih dalam sengketa
- Mutasi/rotasi/demosi jabatan oleh Petahana.

c. Pungut Hitung

- Akurasi data dan penggunaan hak pemilih
- Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara
- Politik uang
- Keterlibatan aparat pemerintah
- Kepatuhan petugas KPPS dalam melaksanakan prosedur pemungutan.

d. Kampanye

- Unsur kampanye kumulatif
- Penyalahgunaan fasilitas, anggaran, dan jabatan, serta keterlibatan PNS
- Politik uang, terutama terkait pasal yang mengatur sanksi tidak dapat digunakan
- Jadwal dan lokasi kampanye tidak disusun secara adil
- Jumlah dan penyebaran APK yang difasilitasi KPU tidak didistribusikan secara adil
- Penanganan terhadap HOAX/penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye terselubung.

e. Dana Kampanye

- Dana kampanye tidak dilaporkan atau berasal dari sumber yang dilarang
- Penggunaan dana bansos untuk kepentingan kampanye paslon
- audit laporan dana kampanye dilakukan secara tertutup.

f. Rekapitulasi

- Penyerahan perlengkapan hasil pemungutan suara di TPS kepada PPK melalui PPS melewati batas waktu yang ditentukan
- KPU dan atau PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu atas hasil penelitian perbedaan jumlah rekapitulasi di masing-masing tingkatannya.

4. Permasalahan dan Masukan dari Bawaslu Provinsi Jabar

- Masalah masih terdapat perbedaan terkait kelembagaan Bawaslu Kab/Kota sebagaimana yang tercantum dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, baik tentang definisi, nomenklatur, sifat (tetap atau adhoc), serta jumlah keanggotaan.
- Ketidaksinkronan antara kedua UU tersebut juga adalah terkait dengan perbedaan durasi waktu penanganan dugaan pelanggaran, durasi waktu pemberian keterangan tambahan, kewenangan melakukan penanganan pelanggaran, serta beberapa hal lainnya.
- Harus ada standarisasi terhadap Suket (pengganti sementara KTP-el), karena ada yang bentuknya besar, dan ada yang kecil. Disamping itu ada yang mencantumkan masa berlaku, ada pula yang tidak.
- Perlu dipikirkan tentang kantor Bawaslu Provinsi Jabar, karena yang digunakan saat ini tidak representatif.
- Untuk lebih melibatkan masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Provinsi Jabar telah mengadakan SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif), dimana para kader yang dididik tersebut akan membantu Bawaslu di wilayah Provinsi Jabar secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada. Total kader SKPP pada pelaksanaan tahun 2019 berjumlah 1,868 orang, yang terdiri dari 80 orang untuk tingkat provinsi, dan 1.788 orang untuk tingkat kab/kota.

5. Catatan dari Anggota Komisi II DPR RI

- Bawaslu Provinsi Jabar dan seluruh jajarannya harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang bukan hanya bersifat standar, namun harus inovatif untuk dapat mewujudkan pilkada yang berkualitas.
- Bawaslu harus berkoordinasi dengan KPU dalam mensosialisasikan latar belakang setiap agar masyarakat mengetahui dengan jelas kualitas dan kapabilitas dari masing-masing calon.

- Komisi II DPR RI mengapresiasi Bawaslu Provinsi Jabar atas pembentukan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), yang nantinya akan membantu tugas-tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada/Pemilu di Jawa Barat, dan berpandangan bahwa hal ini bisa menjadi model untuk dapat diterapkan pula di daerah lain.

C. PERTEMUAN DENGAN OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI JABAR

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

- Berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman Perwakilan Provinsi Jabar sepanjang tahun 2019, tiga instansi di Provinsi Jabar yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah (75 laporan), Kepolisian (22 laporan), dan Kantor Pertanahan/Kanwil BPN (18 laporan). Sedangkan untuk substansi permasalahan yang dilaporkan adalah terkait dengan agraria (26 laporan), kepolisian (22 laporan), dan pendidikan (17 laporan). Adapun jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan adalah sebanyak 194 laporan, atau naik sekitar 11% dari tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 175 laporan.
- Terkait upaya pencegahan maladministrasi, Ombudsman Perwakilan Provinsi Jabar pada tahun 2019 melakukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi
 - Ombudsman Goes to Campus dan Goes to School di wilayah Kabupaten Sukabumi
 - Sosialisasi pelayanan Publik sebanyak 30 kegiatan
 - Mengadakan Pekan Layanan Publik
 - b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - Membentuk Baraya Ombudsman
 - Mengadakan ToT dan pertemuan berkala
 - c. Pengawasan Pelayanan Publik
 - Pengawasan agenda tahunan layanan publik
 - Sidak layanan publik
 - Pengawasan Zon Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 - d. Kerjasama antar Instansi
 - Melakukan review terkait MOU yang telah ditandatangani dengan instansi terkait
 - Melakukan peninjauan MOU dengan Kabupaten Bandung terkait pelayanan pada DPMPSTP
 - e. Kajian Pelayanan Publik
 - Terkait Pengadaan Tanah untuk Kereta Api Cepat Indonesia China
 - Penilaian kepatuhan terhadap 12 kab/kota di Jabar
 - f. Pengelolaan Pengaduan dan SP4N
 - Melakukan sosialisasi dan monitoring terkait SP4N di Kanwil Kumham Jabar, Pemrov Jabar, Pemkot Bandung, dan Pemkot Cirebon.

2. Permasalahan dan Masukan dari Ombudsman

- Dengan memperhatikan cakupan wilayah dan analisa beban kerja, jumlah SDM di Ombudsman Perwakilan Provinsi Jabar masih belum memadai. Tugas pemeriksaan membutuhkan waktu analisa yang cukup lama sehingga perlu dibentuk tim pemeriksa, namun karena keterbatasan jumlah asisten, hal tersebut sulit untuk dilaksanakan. Saat ini jumlah asisten yang ada adalah sebanyak 8 orang, dan masih diperlukan penambahan minimal sebanyak 5 orang.
- Sistem dropping anggaran dari pusat ke perwakilan masih menggunakan sistem revolving sehingga realisasi anggaran menjadi lambat.
- Kantor Perwakilan yang digunakan saat ini masih sewa dan kurang representatif, dan sarpras yang ada (alat-alat teknologi seperti komputer, dan lain-lain juga belum memenuhi standar nasional.
- Pemahaman penyelenggara terkait Tupoksi Ombudsman masih kurang, ditambah pula dengan ketidakpatuhan penyelenggara dalam menjalankan tindakan koreksi/rekomendasi Ombudsman.
- Belum adanya daya tekan dalam pelaksanaan tindakan korektif sehingga banyak penyelenggara yang tidak patuh karena tidak ada daya ikat atau implikasi.
- Perubahan kebijakan atau komitmen dari penyelenggara pemerintahan karena adanya pergantian Kepala Daerah ataupun pimpinan OPD dalam percepatan penanganan laporan.

D. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR JABAR

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemprov Jabar terus memelihara kerjasama yang baik dengan pemerintah kab/kota, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur, Kawasan Ekonomi Khusus, pengendalian inflasi (dengan terbentuknya (TPID), peningkatan produksi di sektor pertanian, lingkungan hidup, dan lain-lain.
- Salah satu inovasi Pemprov Jabar dalam upaya melakukan koordinasi yang efektif dengan pemerintah kab/kota di wilayah Provinsi Jabar adalah melalui penyelenggaraan rapat/pertemuan yang dikemas dengan nama KOPDAR (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), yakni sebuah forum yang dibentuk dalam komunikasi dan silaturahmi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Jawa Barat. Pertemuan dilaksanakan secara berkala (per-tri wulan), dan tema yang dibicarakan dalam setiap pertemuan yang diadakan tersebut disesuaikan dengan isu strategis yang berkembang.

2. Implementasi Reformasi Birokrasi

- Pemprov Jabar telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi dalam sebuah Peraturan Gubernur dimana salah satu areanya adalah pelaksanaan manajemen SDM yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, BKD, dan BPSDM Provinsi Jabar. Hambatan yang dihadapi saat ini yaitu belum adanya standar kompetensi teknis yang berdasarkan aturan dikeluarkan oleh kementerian teknis sehingga menyulitkan untuk mengukur kompetensi.

- Selama kurun waktu 2015-2018, Indeks RB Pemprov Jabar rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5,10% per tahun, dimana kenaikan terbesar dihasilkan dari upaya reformasi di bidang Manajemen Perubahan, Manajemen SDM, dan Pelayanan Publik, yang juga memberikan dampak positif terhadap publik.
- Pemprov Jabar telah membentuk dan mereorganisasi Tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Gubernur Jabar, dimana tim ini akan melakukan evaluasi terhadap upaya internalisasi, sosialisasi, serta pembinaan terhadap perangkat daerah di lingkungan pemprov Jabar maupun di kab/kota.
- Pada tahun 2019 Pemprov Jabar telah mulai melaksanakan pembangunan Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Pembangunan ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana, SDM, dan metode untuk menilai secara komprehensif serta mendorong perangkat daerah agar menerapkan reformasi birokrasi. Sistem ini akan mencakup evaluasi pengelolaan sumber daya, serta penerapan standar tata kerja pemerintahan untuk menghasilkan kinerja terbaik di lingkungan perangkat daerah melalui Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- Sebagai salah satu cara untuk lebih mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan penyusunan ulang Roadmap Reformasi Birokrasi agar lebih selaras dengan RPJMD Provinsi jabar 2018-2023.
- Pemprov Jabar saat ini sedang melakukan upaya untuk menerapkan Beraucracy 3.0 yaitu Birokrasi yang Dinamis (Dynamic Governance) dimana pada level ini pemerintah daerah bukan lagi hanya sebagai regulator (Beraucracy1.0) ataupun hanya sebagai regulator dan fasilitator (Beraucracy 2.0), akan tetapi sudah menjadi fasilitator sekaligus akselerator.

3. Pelayanan Publik

- Dalam rangka upaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik, Pemprov Jabar melalui Biro Organisasi melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terkait dengan jenis layanan (sesuai tupoksi masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan), cara penyusunan standar pelayanan, dan cara melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat. Pemprov Jabar juga mendorong perangkat daerah baik di provinsi maupun di kab/kota untuk berinovasi dengan dilibatkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi.
- Kerjasama dengan Ombudsman dilakukan dalam hal kesepakatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi standar pelayanan, sosialisasi dan evaluasi terkait maladministrasi, serta percepatan dan penanganan pengaduan masyarakat.

4. Penerapan e-Government

Pemerintah Provinsi Jabar telah menerapkan beberapa inovasi terkait dengan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital (e-Government), yang ditujukan untuk memangkas birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Inovasi-inovasi yang telah diterapkan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Aplikasi SAMBARA (Samsat Mobile Jawa Barat)
Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pajak kendaraan bermotor, jadwal samsat keliling dan samsat gendong, lokasi pelayanan samsat, serta persyaratan pendaftaran samsat.

- Hibah Bansos Online
Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan pengusulan program kegiatan yang ingin dibiayai dengan dana hibah bansos.
- Jabar Quick Response
Merespon secara cepat segala bentuk aduan kemanusiaan dan hal-hal yang bersifat darurat.
- Aplikasi Sapawarga
memiliki fungsi sebagai media komunikasi dan menampung berbagai aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Aplikasi ini juga dimaksudkan sebagai bentuk proses demokratisasi melalui sistem digital.
- Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan)
Melalui aplikasi ini dapat diperoleh berbagai informasi terkait lahan perkebunan, mulai dari kondisi geografis lahan, komoditas, infrastruktur, hingga potensi dari lahan perkebunan.
- Jabar Masagi
Inovasi digitalisasi bidang pendidikan yang berpijak pada budi pekerti agar berdampak pada akhlak, serta mengandung nilai luhur kearifan lokal.

Dalam upaya menjaga kondisifitas daerah, Pempro Jabar telah membentuk Tim Saber Hoax, yang berfungsi untuk mengklarifikasi berbagai berita yang beredar di masyarakat.

5. Dana Desa

- Dana desa di wilayah Provinsi Jabar untuk tahun 2019 disalurkan ke 5.312 desa yang tersebar di 19 kabupaten, dan saat ini penyalurannya telah memasuki tahap III. Progres penyaluran DAK Fisik sampai dengan November 2019 telah disalurkan ke RKUD sebesar Rp5,63 Triliun atau sekitar 98,75% dari total alokasi sebesar Rp5,71 Triliun. Sedangkan yang telah disalurkan ke RKDes adalah sebesar Rp4,10 Triliun dengan tingkat penyerapan adalah sebesar Rp2,83 Triliun atau sekitar 69%.
- Adanya dana desa yang bersumber dari APBN yang diluncurkan sejak tahun 2015 telah memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan atau Keputusan Bupati sebagai dasar penetapan APBDes sering terlambat sehinggamengganggu perencanaan dan penetapan APBDes.
 - b. Terbatasnya SDM yang berkualitas di desa, sehingga Input APBDes dalam bentuk Siskeudes sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten sering mengalami keterlambatan.
 - c. Masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam Musdes maupun Musrenbangdes dikarenakan masih kuatnya dominasi elit desa dalam menentukan program dan kegiatan.
 - d. Masih adanya paket kegiatan pembangunan desa yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Pemborong, tanpa gotong royong/padat karya.
 - e. Pembangunan desa masih berorientasi pada pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur dasar, sedangkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa masih minim.

6. Program KTP Elektronik (e-KTP)

Berdasarkan data terakhir yang dimiliki oleh Pemprov Jabar (per awal Desember 2019), dari jumlah wajib KTP sebanyak 33.331.891 jiwa, tingkat perekaman KTP-el telah mencapai 32.623.514 atau sekitar 97,87%. Sedangkan jumlah kepemilikan KTP-el (telah didistribusikan) adalah sebanyak 32.092.014 atau 96,28%.

Dua permasalahan utama terkait dengan pelaksanaan program KTP-el ini adalah ketersediaan blanko KTP-el yang sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan, serta sarana prasarana yang sudah kurang memadai karena banyak yang sudah usang/rusak.

7. Bidang Kearsipan

- Dalam rangka peningkatan kinerja di bidang kearsipan, Pemprov Jabar melakukannya dengan meningkatkan kapasitas SDM kearsipan melalui bimtek, sertifikasi, inpasing jabatan fungsional arsiparis, dan sosialisasi 4 pilar kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistek Keamanan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis), serta dilaksanakan dengan cara kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kab/kota.
- Upaya lain untuk lebih mengoptimalkan kinerja di bidang kearsipan Pemprov Jabar melalui Dispusipda (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah) Jabar juga melakukan langkah-langkah yaitu memanfaatkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD untuk pengelolaan kearsipan, optimalisasi dan penataan ruang depo arsip, serta melakukan audit internal terhadap seluruh OPD dalam lingkup Pemprov Jabar.
- Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja dibidang kearsipan adalah :
 - Belum semua perangkat daerah mempunyai arsiparis (hanya 16 dari 37 OPD), dan terbatasnya sarana prasarana kearsipan yang memadai.
 - Penyusutan/pemusnahan arsip belum dilakukan secara kontinyu
 - Kesadaran terhadap pengelolaan arsip masih rendah.

8. Permasalahan dan Masukan dari Gubernur Jabar

- Untuk dapat lebih memacu pertumbuhan sekaligus pemerataan pembangunan daerah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemekaran daerah merupakan salah satu alternatif dalam rangka mendekatkan jangkauan pelayanan dan rentang kendali tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemprov Jabar meminta agar usulan pembentukan DOB di wilayah Jabar yang telah disampaikan kepada Pemerintah dan Komisi II DPR RI dapat segera direalisasikan.
- Selain Reformasi Birokrasi dan Infrastruktur, kualitas SDM yang memadai juga merupakan kunci keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemprov Jabar melakukan beberapa strategi untuk menyiapkan SDM yang handal sejak awal. Salah satunya adalah mengadopsi kurikulum korporasi untuk diterapkan di SMK yang ada di Jawa Barat. Pemprov Jabar juga bekerjasama dengan pihak swasta/pabrik untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap warga sekitar pabrik (teaching factory). Namun dalam beberapa tahun terakhir ini tercatat sudah sekitar 120 perusahaan yang pindah ke Jawa Tengah diakibatkan tingginya

UMR di Provinsi Jabar, sehingga hal ini menjadi dilemma tersendiri bagi Pemprov Jabar.

- Pengembangan beberapa wilayah di Provinsi Jabar masih banyak yang terkendala dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai, misalnya terkait dengan pengembangan Rebana Golden Triangle yang akan diplot sebagai New Industrial Area and Town Development.. Disamping itu upaya untuk mengusulkan suatu wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terlalu rumit birokrasi yang harus dilalui karena banyak Kementerian/Lembaga yang harus mengeluarkan izin.
- Lokasi Wisata di wilayah Provinsi Jabar masih banyak yang berada di lahan milik BUMN, dan seharusnya bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.

9. Catatan dari Anggota Komisi II DPR RI

- Terkait usulan DOB di wilayah Provinsi Jabar, disarankan agar Pemprov Jabar juga dapat menyampaikan data-data terkait keberhasilan DOB. Pemerintah kab/kota dan DPRD kab/kota terkait juga harus lebih pro-aktif dalam mengawal usulan tersebut.
- Untuk lebih mengakselerasi program-program yang ada di daerah, Gubernur Jabar harus lebih mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat (seluruh Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat) agar lebih mudah untuk dapat dtindaklanjuti di tingkat pusat.
- Konsep-konsep inovatif yang dikembangkan oleh Pemrov Jabar harus diiringi dengan kesiapan SDM dalam pengimplementasian. Disamping itu, Pemprov Jabar Bersama dengan pemerintah kab/kota juga harus memberikan pendampingan secara lebih intens terhadap berbagai potensi yang dikembangkan oleh masyarakat, terutama di tingkat desa.
- Agar dapat lebih mendukung upaya untuk menyiapkan lulusan SMK yang terampil, perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkan aset daerah yang sudah tidak terpakai lagi untuk diserahkan ke sekolah-sekolah supaya dapat digunakan (misalnya untuk kegiatan praktek).

E. PERTEMUAN DENGAN BPN PROVINSI JABAR

1. Kelembagaan

- Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jabar mempunyai 28 satker yang terdiri dari 27 satker Kantor Pertanahan dan 1 satker Kantor Wilayah. Dari 28 satker yang ada tersebut, jumlah petugas ukur yang dimiliki adalah sebanyak 194 orang (berstatus ASN) yang tersebar di 26 Kantah kab/kota dan di Kanwil (Kabupaten Pangandaran belum ada petugas ukur yang berasal dari ASN), dan dibantu oleh 197 orang Surveyor Kadaster Berlisensi. Sehingga jumlah petugas ukur di wilayah Kanwil BPN Provinsi Jabar adalah sebanyak 391 orang. Apabila melihat volume pekerjaan pelayanan rutin dan PTSL/PSN serta dengan memperhatikan kemampuan analisis petugas ukur, maka setidaknya dibutuhkan sebanyak 667 orang petugas ukur. Dengan demikian masih terdapat kebutuhan petugas ukur sebanyak 276 orang.

- Dari 28 satker yang ada saat ini, terdapat 25 satker yang telah mempunyai status Hak Kepemilikan Tanah dan Gedung. Sedangkan 3 satker yang belum mempunyai staus Hak Kepemilikan adalah :
 - Kota Cimahi (Tanah milik Pemkot, Bangunan milik BPN);
 - Kabupaten Bandung (Tanah milik Pemkab, Bangunan sebagian milik Pemkab dan sebagian milik BPN);
 - Kabupaten Pangandaran (Tanah sudah ada, namun pembangunan kantor baru belum dilaksanakan sehingga saat ini Kantor Pertanahan masih sewa).

2. Pelaksanaan Program PTSL

- Sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 realisasi yang dicapai terkait pelaksanaan program PTSL di wilayah Provinsi Jabar adalah sebagai berikut :
 - Terbit Peta Bidang Tanah (PBT) 1.360.470 bidang (100%), K4 = 151.664 bidang (95,21%).
 - Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) 949.630 sertifikat (94,64%)
 - Produk keseluruhan lainnya (K1, K2, dan K3) 959.002 bidang (95,58%)

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (2018), PBT dan SHAT tahun 2019 lebih cepat penyelesaiannya, dan realisasi SHAT juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai sekitar 72%.

- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PTSL adalah pihak pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya mendukung kegiatan ini.

3. Penanganan Kasus Pertanahan

- Jumlah kasus pertanahan yang ditangani oleh BPN Prov/Kab/Kota di Jabar berjumlah sebanyak 929 kasus yang terdiri dari :
 - Sengketa Pertanahan (194 kasus), dimana dari jumlah tersebut ada 125 kasus yang telah diselesaikan, 69 kasus masih dalam proses penanganan, dan 2 kasus dihapus dari register karena tidak jelas subyek dan obyeknya.
 - Konflik Pertanahan (5 kasus), yang seluruhnya masih dalam proses tindak lanjut penanganan.
 - Perkara Pertanahan (730 perkara), yang terdiri dari perkara Perdata di Pengadilan Negeri sebanyak 670 perkara (158 telah diselesaikan), dan perkara Tata Usaha Negara sebanyak 61 perkara (20 telah diselesaikan).
- Hambatan dan kesulitan dalam penanganan kasus

Sengketa dan Konflik

- Dokumen yang menjadi obyek pengaduan sering tidak ditemukan di Kantor Pertanahan setempat.
- Pengaduan tidak dilengkapi dengan data yang memadai.
- Adanya keraguan dalam mengambil keputusan terkait pembatalan SK atau Sertifikat HAT karena adanya cacat prosedur dalam penerbitannya, karenanya pihak BPN sering menjadi obyek laporan pidana.
- Adanya tumpang tindih putusan Lembaga peradilan.
- Administrasi pertanahan masa lalu yang belum tertib.
- Sengketa yang berkaitan dengan aset baik Kementerian/Lembaga atau BUMN/BUMD terkendala SOP yaitu adanya bukti penghapusan aset dari pemegang aset.

Perkara

- Adanya putusan Lembaga peradilan TUN dalam gugatan fiktif negatif yang telah inkraht namun tidak dapat ditindaklanjuti karena obyek bidang tanahnya berupa aset atau secara fisik tidak dikuasai oleh pemegang perkara.

4. Reforma Agraria

- Pelaksanaan Redistribusi Tanah di wilayah Provinsi Jabar pada tahun 2019 mencapai 90,03% dari target sebanyak 27.500 bidang. Realisasi fisik berada di `13 kab/kota yaitu :
 - Kab. Ciamis (1.000 bidang)
 - Kab. Majalengka (500 bidang)
 - Kab. Karawang (1.300 bidang)
 - Kab. Bogor (300 bidang)
 - Kab. Subang (2.153 bidang)
 - Kab. Tasikmalaya (3.120 bidang)
 - Kab. Bandung Barat (400 bidang)
 - Kab. Pangandaran (500 bidang)
 - Kab. Sumedang (500 bidang)
 - Kab. Sukabumi (4.000 bidang)
 - Kota Banjar (3.000 bidang)
 - Kab. Garut (2.756 bidang)
 - Kab. Cianjur (5.081 bidang)
- Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Jawa Barat dilakukan di DAS Citarum yang melewati 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Cianjur, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan seluruhnya (20.000 bidang).

5. Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan

- Kegiatan pembuatan Peta Dasar di wilayah Provinsi Jabar pada tahun 2019 belum ada. Target pembuatan adalah pada tahun 2020 dengan volume 95.000 Ha, dan direncanakan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan ketersediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT).
- Untuk kegiatan pembuatan peta tematik di Provinsi Jabar tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Subang. Pemilihan Kabupaten Subang sebagai lokasi pembuatan Peta Tematik karena dinamika pembangunan/investasi akan mengarah ke Kabupaten Subang.
- Pembuatan Peta Tematik juga dilakukan di Kanwil, dengan informasi yang disajikan meliputi :
 - Peta sebaran HGU, HGB, HP (dengan luasan diatas 10 Ha);
 - Peta Neraca Penatagunaan Tanah;
 - Peta Redistribusi Tanah;
 - Peta Konsolidasi Tanah;
 - Peta sebaran Sengketa, Konflik, dan Perkara;
 - Peta sebaran Tanah Terlantar; dan
 - Peta Zona Nilai Tanah.

6. Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

- Kegiatan Pengadaan Tanah di wilayah Provinsi Jabar untuk Proyek Strategis Nasional berjumlah sebanyak 26 kegiatan (tersebar di 23 kabupaten/kota), dimana 24 kegiatan menggunakan mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2012 dan 2 kegiatan menggunakan mekanisme Perpres Nomor 62 Tahun 2010.
- Pengadaan tanah untuk Proyek Strategis nasional yang telah selesai adalah sebagai berikut :
 - Jalan Tol Ciawi-Sukabumi (Seksi I) sebanyak 2.274 bidang dengan luas sebesar 196.03 Ha.
 - Jalan Tol Soreang-Pasirkoja sebanyak 2.088 bidang dengan luas sebesar 108,79 Ha.
 - Jalan Tol Bogor Ring Road (Seksi II-B) sebanyak 194 bidang dengan luas sebesar 4,31 Ha.
 - Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (Seksi I) sebanyak 161 bidang dengan luas sebesar 5,71 Ha.
 - PLTU 2 x 1.000 MW di Kabupaten Indramayu sebanyak 536 bidang dengan luas sebesar 277,23 Ha.
 - Bendungan Leuwikeriss (Tahap I) sebanyak 1.350 bidang dengan luas sebesar 309,11 Ha.

7. Masalah Ketataruangan

- Pelanggaran tata ruang di wilayah Provinsi Jabar akan terus meningkat karena belum semua kab/kota di Jabar memiliki RDTR (yang sudah memiliki RDTR baru 3 daerah yaitu Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya), sementara pengawasan dan pengendalian terhadap RTRW masih lemah, dan penerapan sanksi yang belum diterapkan.

8. Catatan dari Anggota Komisi II DPR RI

- Koordinasi antara BPN dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jabar belum optimal karena seringkali kegiatan-kegiatan BPN yang merupakan kebijakan dari Pusat tidak/terlambat diketahui oleh Pemda, sehingga terkesan Pemda kurang mendukung program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh BPN di daerah. Kedepan, perlu kiranya agar BPN di daerah-daerah juga dijadikan sebagai salah satu unsur Forkopimda, sehingga koordinasi dan komunikasi terkait dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh BPN dapat berjalan lebih optimal.
- BPN harus memikirkan langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam menyikapi tanah adat karena status tanah adat tersebut seringkali menjadi sumber permasalahan berbagai kasus pertanahan yang terjadi.
- SKB 3 Menteri masih belum terimplementasi dengan baik, terutama di tingkat desa.
- BPN harus mampu menjadi ujung tombak dalam upaya pemberantasan mafia tanah (dan bukan justru menjadi salah satu pelaku). Dengan demikian data yang valid dan lengkap harus benar-benar dimiliki oleh BPN.
- Sosialisasi terkait kegiatan PTSL masih belum maksimal.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020

- Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Jabar hingga saat ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan sinkronisasi peraturan, dan penyesuaian honorarium badan penyelenggara adhoc yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar sudah berjalan “*on the right track*” dan banyak inovasi yang dikembangkan untuk lebih memacu pertumbuhan di wilayah tersebut. Untuk itu perlu dukungan yang maksimal dari pemerintah pusat, bukan saja dalam bentuk dukungan anggaran, akan tetapi juga berupa kebijakan dan aturan yang lebih memihak kepada daerah.

3. Program KTP Elektronik

- Untuk menjamin kesinambungan proses pencetakan KTP elektronik di wilayah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam rangka menghadapi pilkada serentak tahun 2020, kondisi perangkat dan sarana prasarana pendukung perlu untuk segera diperbaiki dan ditingkatkan (peremajaan kembali). Kecukupan blangko KTP-el juga harus menjadi prioritas.

4. Pertanahan

- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab BPN di wilayah Provinsi Jabar, termasuk dalam kaitannya dengan proyek strategis nasional, sudah berjalan dengan baik. Namun demikian keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang serta minimnya anggaran merupakan faktor-faktor yang seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan tugas bagi BPN di wilayah Provinsi Jabar, terutama pada kab/kota yang memiliki cakupan wilayah yang luas.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Komisi II DPR RI juga telah meminta kepada pihak terkait agar segala permasalahan maupun usulan dapat pula disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2020

**Ketua Tim
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI**

**Saan Mustopa, M.Si
A-367**

